

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran masyarakat terhadap hakekat budaya khususnya nilai dan sikap mendorong terjadinya kehidupan yang harmonis. Nilai dan sikap yang sesuai dengan watak dan karakter bangsa merupakan salah satu komponen penting dalam membangun keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*). Akan tetapi Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya ternyata belum berhasil melakukan internalisasi nilai keadaban yang terlihat dari masih mengemukanya berbagai gejolak sosial di masyarakat seperti semangat kemasyarakatan dalam kebersamaan yang mulai memudar, tidak tertibnya warganegara, ketidak saling percayaan antar sesama warganegara dan kurangnya sikap toleransi. Kondisi ini menunjukkan telah terjadinya perubahan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat seperti meninggalkan nilai kebersamaan (tolong menolong, gotong royong dan musyawarah) kearah sikap individual (Mariati, 2012).

Terjadinya pergeseran nilai ini tentunya akan melemahkan watak dan karakter dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Runtuhnya watak dan karakter bangsa menyebabkan dinamika hubungan antar budaya, antar agama dalam kehidupan warganegara meninggalkan masalah yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan bangsa. Pemahaman terhadap rasa menghormati dan menghargai (toleransi) serta rasa senasib sepenanggungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum tertanam secara mendalam (Alfian, 2013). Kondisi inilah yang terjadi pada sebagian generasi muda masyarakat sambas. Hal tersebut menurut beberapa pemuka masyarakat melayu sambas disebabkan oleh

banyak faktor diantaranya yaitu kontrol orang tua yang lemah, pendidikan nilai dan agama relatif kurang atau terabaikan, peran tokoh agama mulai memudar, pengaruh telekomunikasi dan informasi yang mengkhawatirkan. Persoalan yang melatarbelakanginya adalah persoalan degradasi jati diri yang disebabkan runtuhnya karakter bangsa. Maka *nation and character building* harus menjadi inti pembangunan dalam meretas jalan menuju masyarakat yang berperadaban (Fauzi , 2014).

Lebih lanjut dapat dilihat dari hasil penelitian Wahab (2015) menemukan telah muncul sejumlah masalah atau dampak moral dan sosial di beberapa komunitas Melayu kecil. Interpersonal dan kelompok yang akan menghancurkan tatanan sosial budaya masyarakat Sambas yang terkenal dengan sopan, cara agama dan bahkan memanggil serambi mekah setelah Aceh, dengan memahami dan mempraktikkan nilai kearifan lokal menjadi bentuk baru dari pendidikan masyarakat sambas dalam upaya untuk merespon dampak negatif berupa sopan santun melalui ucapan (*sapa base*) dalam komunikasi budaya lokal masyarakat melayu sambas. Sebenarnya, semua masalah bangsa tersebut bermula dari sebuah kualitas karakter atau personal individual dari warga negara (Megawangi 2004 hlm 6).

Krisis multidimensi sebenarnya berakar pada rendahnya kualitas moral bangsa yang ditandai dengan membudidayanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), konflik (antar etnis, agama, politisi, remaja, dan antar daerah), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan banyak lagi. Budaya korupsi yang merupakan praktik pelanggaran moral (ketidak jujur, tidak bertanggung jawab, rendahnya disiplin, rendahnya komitmen kepada nilai-nilai kebaikan), adalah penyebab utama negara kita sulit untuk bangkit dari krisis ini (Susanto,2016 hlm.96).

Hal yang sama juga diungkapkan Zuriyah, (2012) bahwa telah krisis multidimensional yang tak kunjung usai, kondisi diperburuk dengan krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa yang berimbas kepada generasi muda. Tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin merosot tidak hanya di perkotaan tapi sudah merambah ke pedesaan. Kondisi rusaknya watak dan karakter bangsa ini tentunya dapat melemahkan identitas bangsa. Kekuatan budaya merupakan sumber utama yang penting dalam pembentukan identitas dan pembangunan peradaban menjadi sumber dalam *Civic Virtue* atau Keadaban kewarganegaraan. Hal ini menjadi wajib dipelihara oleh setiap masyarakat agar nilai-nilai luhur ini terus ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga identitas warganegara bisa tetap terlihat dan terjaga.

Keadaban kewarganegaraan tentunya tidak lepas dari Budaya kewarganegaraan karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembudayaan pembinaan watak dan karakter warga negara. Selain itu unsur dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) adalah *civic virtue* atau kebajikan atau ahlak kewarganegaraan yang mencakup ketertiban aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan (Winataputra 2006, hlm 62).

Civic virtue adalah “*the willingness of the citizen to set aside private interest and personal concerns for the sake of the common good*” (Quigley, dkk, 1991, hlm 11 dalam Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 221) atau kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Tentang hal ini Quigley dan Bahmueller meyakini bahwa kebajikan kewargaan merupakan domain psikososial individu yang

secara substantif memiliki dua unsur, yaitu watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*). Watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi (*...those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*). Sedangkan *civic commitment* adalah atau komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional (*...the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy*) (Quigley & Bahmueller, 1991:11).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Civic Virtue* atau Akhlak kewarganegaraan perlu terus dikuatkan terutama menghadapi penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai, watak dan karakter bangsa Indonesia. Penguatan keadaban kewarganegaraan berorientasi terhadap pembentukan kualitas personal individual warga negara, sehingga *civic Virtue* berkenaan suatu proses adaptasi secara psikis dan sosial masing-masing individu dari ikatan budaya komunitas (keluarga, suku, dan masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya suatu negara yang disebut kewarganegaraan.

Personal Kualitas individu dalam ikatan komunitas masyarakat lokal melalui ikatan nilai dalam budaya turut mempengaruhi masyarakat sebagai pemilik budaya itu sendiri tentunya nilai yang dimaksud adalah nilai yang dapat memberikan manfaat lokal sekaligus memiliki standar yang diakui. Oleh karena itu nilai tersebut memiliki kebenaran yang disepakati bersama sehingga dinamakan nilai kearifan lokal. Untuk itu budaya lokal merupakan salah satu dasar dalam pembentukan karakter bangsa yang merupakan cerminan perilaku seseorang dalam masyarakat (Yunus, 2013). Hal ini sesuai dengan pendapat

Jenkins (2004 hlm 115) perlunya peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah dan membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial budaya lokal. Kearifan lokal menjadi suatu konsep yang semakin populer penggunaannya dalam kehidupan bersama pada masa kini. diperlukan peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah dan membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial budaya lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan lokal yang berisi kebijakan atau pandangan hidup (Anggraini dan Kusniarti 2015: 89).

Senada dengan hal ini Sibarani (2012) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa kearifan lokal sebagai *local genius* yang mampu mengatur tata kehidupan masyarakat untuk dua hal yang sangat penting yakni penciptaan kedamaian dan peningkatan kesejahteraan.

Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia. Poespowardojo dalam Rahyono (2009 hal 9), *local genius* memiliki ketahanan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar maupun yang berkembang untuk masa-masa mendatang. Hal ini diperkuat oleh Rosidi (2011 hlm 29) mengatakan nilai kearifan lokal merupakan “Rekonstruksi untuk mempertahankan sebuah budaya dalam suatu bangsa, termasuk di Indonesia”. Kebudayaan yang datang dari luar telah menghasilkan akulturasi yang tidak menenggelamkan nilai-nilai kearifan lokal kita miliki, melainkan

menggunakannya sebagai kekuatan untuk merangsang kreativitas yang dapat melahirkan karya-karya unggul yang khas dengan kata lain kepribadian suatu masyarakat ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan kearifan lokal dalam menghadapi kekuatan dari luar.

Untuk itu kebajikan atau ahlak kewarganegaraan sangatlah dibutuhkan dalam transformasi nilai-nilai lokal. Kearifan lokal yang penuh nilai-nilai moral yang ada di wilayah negara hendaknya dapat dikembangkan dengan cara mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter dan identitas bangsa seperti yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan kearifan budaya lokal masing-masing. Sesuai hasil penelitian Agatha (2016) dinyatakan bahwa kearifan tradisional yang sebetulnya terdapat budaya yang diyakini, nilai-nilai, norma, dan praktik masih memiliki peran dalam masyarakat kontemporer karena di dalamnya terdapat pengetahuan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan pembangunan masyarakat.

Pengembangan masyarakat dapat dilihat dalam wujud transformasi. Dalam konteks “perubahan” baik fungsi, bentuk atau struktur tidak memiliki batas yang tegas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Daszko dan Sheinberg (2005 hlm 57) yang menyatakan bahwa wujud transformasi merupakan kreasi dan perubahan dalam keseluruhan bentuk, fungsi atau struktur. Bila dipahami maka sesungguhnya ada dua transformasi yakni transformasi yang teramati secara fisik dan transformasi yang terjadi di dalam diri individu sebagai penggerak dari proses transformasi. Jadi bisa saja terjadi perubahan struktur sebagai modifikasi beberapa elemen dari suatu kondisi dan fungsi sesuatu namun tanpa mengubah esensi nilainya.

Budaya lokal yang masih bertahan sampai saat ini masih menampilkan identitas budaya adalah dalam masyarakat Melayu Sambas, Menurut Erwin

dalam Yusriadi (2009 hlm 97), kerajaan Sambas pertama kali didirikan oleh Raden Sulaiman (1631-1688) sekaligus didaulat sebagai sultan yang pertama pada 10 Dzulhijah 1040 H. bertepatan dengan 9 Juli 1631 M. Sultan ini kemudian diberi gelar Muhammad Tsafiuddin I. Dengan demikian, sejak awal tahun 1600-an, Islam telah berkembang di Sambas. Singkatnya, keberadaan Islam di Sambas tergolong sudah cukup tua.

Masyarakat Sambas yang terkenal sebagai masyarakat yang religius masih menjunjung tinggi tradisi dan adat, terutama dalam kehidupan. Bahkan katanya, kehidupan yang dijalankan masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya nenek moyang yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Agama (Yusriadi, 2015). Salah satu adat budaya Melayu di Kabupaten Sambas yang masih berkembang dan dilestarikan sejak zaman dahulu hingga sekarang ini adalah budaya *saprahan* yang selalu diadakan pada pesta perkawinan. Bentuk kegiatan dalam Adat tradisi ini yaitu kegiatan makan bersama-sama berkelompok baik di dalam rumah sehari-hari ataupun dalam acara mengundang tamu ataupun acara-acara pesta yang diadakan di rumah ataupun di desa. Hidangan lauk pauk disajikan pada tempat dinamakan baki ataupun dihamparkan kain untuk disantap bersama-sama berkelompok sejumlah 6 orang setiap saprahan dengan duduk bersila di atas hamparan tikar.

Menurut Munawar (2003: 65), *Saprahan* dapat diartikan secara singkat yaitu duduk bersila nampa, yaitu makan bersama dengan menghadap sebuah talam (nampan) yang besar dengan beragam lauk-pauk. Biasanya satu nampan tersebut diperuntukkan untuk enam orang. Adapun makna filosofi dari tradisi saprahan ini adalah Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing, Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah. *Filosofi* yang tepat untuk melambangkan kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Sambas yang hingga saat ini masih terjaga dengan baik.

Masyarakat Sambas mayoritas memeluk agama Islam dan mereka yang beragama Islam identik dengan Melayu. Melayu adalah orang yang berbahasa Melayu dan memeluk Islam sehingga Islam menjadi bagian dari identitas Melayu atau dengan kata lain Islam telah menjadi salah satu karakteristik utama kemelayuan di Sambas. (Suni, 2007 hlm 17). Masyarakat Sambas sangat menjunjung tinggi agama Islam sebagai sistem nilai dan bersandar pada nilai-nilai adat dan tradisi. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup mereka sehari-hari yang berbunyi “Hidup bersendikan adat, adat bersendikan agama, agama bersendikan kitabullah dan kitaburrahul.

Di sisi lain, bukan menjadi rahasia, bahwa di kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari multi etnis dengan ragam budaya dan agama. Masyarakat Sambas memiliki etnik terbesar meliputi etnik Melayu, Dayak, Cina, Bugis dan Jawa. Di antara etnik tersebut terdiri dari agama Islam, Kristen, Budha dan Kong Hucu. Namun jika dikelompokkan berdasarkan sejarah, maka Melayu, Dayak dan Cina lebih menyebar keberadaannya. Sehingga wajar etnik-etnik tersebut dijadikan representatif kultur dan identitas masyarakat Sambas. Artinya ketika ingin memetakan masyarakat Sambas dalam dimensi etnik, maka etnik-etnik tadi yang menjadi obyeknya. Atau paling tidak salah satu etniknya, seperti Melayu karena secara kuantitas yang terbesar. Dan secara historis, bahwa Sambas merupakan salah satu daerah kesultanan Melayu.

Berpijak dari keberagaman kelompok etnik dan konsekuensi logis dari perbedaan identitas dan kultur yang mewarnai kelompok-kelompok etnik maka memungkinkan Sambas ke depan sangat potensial terjadi konflik. Apalagi fakta sejarah telah membuktikan beberapa waktu yang lalu terjadi konflik antar etnik. Sambas pernah menorehkan sejarah penuh darah tepatnya tahun 1999, yaitu konflik suku Melayu (Sambas) dengan suku Madura

(Alqadri 2003 hlm 106) Maka tidak mengherankan Sambas di mata pemerintahan pusat (Jakarta) dikategorikan sebagai “kawasan merah” yang perlu mendapatkan prioritas khusus dalam hal penanganan konflik.

Masyarakat Sambas akan melalui proses transformasi yang terus-menerus. Tantangan dan peluang dari keragaman dalam proses globalisasi hanya dapat diatasi jika pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan antarbudaya yang saling terkait. Praktik dan pendekatan melalui prinsip dan metode pendidikan antar budaya digunakan untuk pembangunan bangsa baik internasional, nasional serta lokal. (Sandu 2015 hlm 1).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana kependidikan yang dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil yang ada dalam konsep PKn berbasis kearifan lokal pada masyarakat Melayu *Sambas*. Termasuk ke dalam aspek instrumental tersebut adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar, dan lingkungan. Praksis adalah perwujudan nyata dari sarana kependidikan yang terobservasi. Pada dasarnya hal itu merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut merupakan interaksi keyakinan, semangat, dan kemampuan para praktisi, serta konteks Pendidikan Kewarganegaraan. “Yang termasuk ke dalam praksis Pendidikan Kewarganegaraan adalah interaksi belajar di kelas dan atau di luar kelas, dan pergaulan sosial-budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memberi dampak edukatif kewarganegaraan”. Hal ini juga yang kemukakan oleh Budimansyah dan Suryadi (2008 hlm 20).

PKn sebagai dimensi sosial kultural mengakomodasi keterlibatan PKn dalam kegiatan kemasyarakatan yang berada dalam ruang lingkup kebudayaan, baik dalam konteks budaya artifac (pelestarian benda- benda

yang bermakna budaya), budaya sosifac (kegiatan-kegiatan kemasyarakatan), dan konteks budaya mantifac (pelestarian nilai- nilai yang terkandung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan). Wahab dan Sapriya (2011 hlm 97) menjelaskan tiga domain PKn, yaitu domain akademis yakni berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan, domain kurikuler yakni konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal, nonformal dan informal, dan domain sosial kultural yakni konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat.

Domain sosial kultural inilah yang memberikan ruang kepada PKn untuk berpartisipasi aktif dalam bentuk membekali dan mendorong warga negara tentang pengetahuan, agar warga negara dapat berpartisipasi serta dapat menyukkseskan kegiatan- kegiatan kemasyarakatan yang berkonotasi baik. Hal ini senada dengan ungkapan Somantri (Wahab dan Sapriya, 2011 hlm 316), objek studi *civics* dan *civic education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara". PKn mendorong warga negara agar menjadi warga negara yang berkualitas dan unggul dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, dan menjadikan warga negara menjadi pelopor perubahan masyarakat dalam setiap masanya. Perubahan tersebut bisa dicapai jika warga negara secara konsisten memahami fungsi dan perannya dalam kehidupan masyarakat, dan ini bisa tercapai apabila warga negara mampu mengharmoniskan hak dan kewajibannya dalam masyarakat.

Budimansyah dan Suryadi (2008) menyebutkan bahwa paradigm *Civic Education* ala *Civitas Internasional* dan sejumlah *center for Civic Education* juga menitikberatkan pada pengembangan *civic virtue* dan *civic culture*. Pengembangan Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) melalui transformasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi tradisi dalam masyarakat khususnya

masyarakat Melayu Sambas tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Oleh karena itu perlu dilakukan di luar sekolah. Menurut Tilaar (2004, hlm.90) tidak semudah itu pendidikan saat ini telah direduksi sebagai pembentukan intelektual semata sehingga menyebabkan terjadinya kendangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menyangkut nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang yang terjadi secara cepat atau lambat memiliki pengaruh mendasar bagi pendidikan.

Kondisi ini tentunya, kita tidak menghendaki kehilangan identitas dan karakter bangsa, sehingga bangsa ini akan kehilangan segala-galanya. Penguatan identitas bangsa tidak akan berhasil selama pihak-pihak yang berkompeten untuk menunjang pembangunan karakter tersebut tidak saling bekerja sama. Oleh karena itu, penguatan identitas bangsa perlu dilakukan pada masyarakat secara umum sesuai dengan kearifan budaya lokal masing-masing dan berbagai upaya perlu diintensifkan untuk menjaga eksistensi kita sebagai bangsa yang berkarakter, berbudaya dan berkeadaban tinggi.

Transformasi potensi-potensi nilai budaya lokal perlu dilakukan melalui pendekatan internalisasi, sosialisasi, dan inkulturasi. Menurut Koentjaraningrat (2009 hlm 185) proses kebudayaan meliputi pertama, *Proses Internalisasi* adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Individu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, napsu dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Kedua, *Proses Sosialisasi*, berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Seseorang belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki

beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *Proses Enkulturasi* adalah proses seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, Sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Melalui ketiga pendekatan ini menyebabkan individu dapat menyesuaikan kepribadiannya dengan lingkungan sosial sekitarnya, sehingga dalam pergaulan senantiasa menjunjung tinggi norma-norma dan aturan-aturan masyarakat yang berlaku.

Penanaman budaya lokal agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan identitas atau jati diri lokal dalam globalisasi yaitu dengan memfungsikan dari kebudayaan manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori Fungsionalisme dari Mallinowski bahwa “segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (Malinowski dalam Koentjaraningrat, 2009: 171). Berdasarkan pendapat di atas terkait dalam penelitian ini teori fungsionalisme budaya dari Mallinowski dijadikan sebagai landasan berpikir terkait budaya lokal yang berada di Sambas dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini untuk pengembangan budaya kewarganegaraan dalam membentuk karakter.

Berdasarkan penjelasan di atas perlunya dilakukan penelitian ini karena masyarakat melayu *sambas* memiliki nilai budaya lokal *Saprahan* yang sangat menarik untuk dikaji dalam segi kebudayaan. Transformasi Nilai Kearifan lokal dalam Penguatan keadaban atau Akhlak kewargaan (*Civic Virtue*) diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat dengan cara memfungsikan kembali melalui transformasi nilai kearifan lokal *Saprahan* yang berlaku pada masyarakat

melayu *sambas* guna mewujudkan warganegara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*) yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Untuk itu peneladanan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka warganegara pada masyarakat etnis melayu Sambas sangat penting dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis menetapkan, bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Saprahan* Pada Pesta Perkawinan Melayu Sambas untuk pengembangan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)” ? Untuk dapat mengkaji fokus penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung pada tradisi *Saprahan* pesta perkawinan masyarakat Melayu Sambas?
2. Apa sajakah yang dijadikan sumber rujukan bagi nilai-nilai tradisi *Saprahan* pada pesta perkawinan Melayu Sambas?
3. Bagaimana strategi transformasi tradisi *Saprahan* pada Pesta perkawinan yang potential untuk dapat mengembangkan keadaban kewarganegaraan masyarakat Melayu Sambas?
4. Bagaimana wujud Transformasi nilai tradisi *Saprahan* pada pesta perkawinan sebagai keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*) masyarakat melayu Sambas?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan mengungkapkan Transformasi Nilai Kearifan Lokal *Saprahan* Pada Pesta Perkawinan Melayu Sambas untuk pengembangan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*). Sementara, secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *Saprahan* pesta perkawinan masyarakat Melayu Sambas.
2. Mendeskripsikan sumber rujukan bagi nilai-nilai tradisi *Saprahan* pada pesta perkawinan Melayu Sambas.
3. Menganalisis strategi transformasi tradisi *Saprahan* pada Pesta perkawinan yang potensial untuk dapat mengembangkan keadaban kewarganegaraan masyarakat Melayu Sambas
4. Menganalisis wujud transformasi nilai tradisi *Saprahan* pada pesta perkawinan sebagai keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*) masyarakat Melayu Sambas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari segi teoretis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memperkaya pijakan konseptual teoritik dalam membangun dan memperkuat *body of knowledge* PKn sebagai kajian *multidimensional* (Cogan, 1998, hlm.1); *integrated knowledge system* atau *cross-disiplinary study* (Hartoonian; Hahn & Torney-Purta, dalam Winataputra, 2001, hlm.295); *synthetic discipline* (Somantri, 200, hlm 161) atau *integrated synthetic discipline* (Sapriya 2011, hlm. 148) melalui transformasi kearifan lokal *Saprahan* pesta perkawinan masyarakat Melayu Sambas sehingga menjadi inspirasi dan panduan dalam menyajikan bahan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara integral antara nilai-

nilai budaya lokal atau kearifan lokal yang sesuai Budaya Kewarganegaraan dengan spirit nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat identitas masyarakat melalui pemahaman dan pendalaman Watak Kewarganegaraan. Sebagai Pendidikan yang berintikan demokrasi PKn membutuhkan dukungan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiaologi dan antropologi, guna menuju normal science (Khun, 2012, hlm. 10) melalui pendekatan *socio-cultural development* merupakan pendekatan sosial budaya yang menghargai nilai-nilai budaya yang sudah ada dan kemudian mengangkat nilai-nilai budaya itu untuk menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat yang meliputi PKn kemasyarakatan (*Community civic*).

1.4.2 Manfaat dari segi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat Melayu Sambas terhadap pentingnya nilai kearifan lokal sebagai modal sosio-kultural guna mewujudkan watak dan karakter bangsa.

1.4.3 Manfaat dari segi praktik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada stakeholder pendidikan terutama bagi Guru dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dari etnis Melayu Sambas yang akan memberikan nuansa yang lebih bijak dan berbudaya yang dapat diaktualisasikan dalam *setting* sosial tanpa harus berbenturan dengan nilai-nilai budaya sehingga menampilkan wajah yang ramah, damai dan menyejukan yang pada akhirnya membawa ketenangan serta pencerahan dan dapat diterima dengan

baik dan benar oleh peserta didik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.

- b. Bagi pemuka masyarakat dan Masyarakat Melayu Sambas penelitian yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi sosial dalam menata dan membina watak dan karakter bangsa sehingga kreatifitas dalam menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat dapat berlangsung relatif lebih lama dan tetap terjaga dengan baik sehingga prasangka negatif yang dapat menghancurkan sendi-sendi sosial kemasyarakatan yang dapat melahirkan dan melanggengkan konflik dengan segenap konsekuensinya dapat dihindari.
- c. Bagi pemerintah dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan menciptakan tatanan sosial dalam hal pemberdayaan di masyarakat yang harmonis melalui transformasi nilai kearifan lokal sebagai Civic Virtue.

1.4.4 Manfaat dari segi isu dan aksi sosial

Penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai isu yang berkembang pada masyarakat Melayu Sambas terutama dalam memberikan manfaat dalam bersikap dan bertindak untuk mewujudkan tata pergaulan yang serasi dan harmonis guna mewujudkan keadaban kewarganegaraan (Civic Virtue).

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Bab I membahas Pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang, Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan disertasi.

Bab II membahas Kajian Pustaka yang meliputi: Konsep Kebudayaan, Kearifan Lokal, Masyarakat Melayu Sambas , Keadaban kewarganegaraan (Civic Virtue) penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

Bab III membahas tentang Metode Penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini meliputi; Desain penelitian, Partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan.

Bab IV membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V membahas tentang Kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: Simpulan dan Rekomendasi atau Saran.